

ANALISIS KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM BUKU REFORMASI BIROKRASI SEDARMAYANTI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMERINTAHAN MODERN

**Maria Vanessa Rasuh¹, Siti Fatima Sutiawan², Angelina Valentina Mundiah³, Djelly Wulan
Sarah Sigarlaki⁴, Nathaniel Tarunadjaya⁵, Dewi Walahe⁶, Robby Humawa⁷**

mariavennesa19@gmail.com¹, sutiawansiti@gmail.com², angelinamundiah@gmail.com³,
sigarlakiwulan875@gmail.com⁴, natanieltarunajaya@gmail.com⁵, dewi.walahe31@gmail.com⁶,
robbbyhumawa86@gmail.com⁷

Universitas Gorontalo

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep good governance sebagaimana dikembangkan oleh Sedarmayanti dalam karya Reformasi Birokrasi dan Good Governance, serta mengevaluasi relevansinya terhadap dinamika pemerintahan modern yang ditandai oleh digitalisasi administrasi, tuntutan efisiensi, serta meningkatnya pengawasan publik. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur administrasi publik, regulasi reformasi birokrasi, serta dokumen resmi pemerintah terkait transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip good governance—meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik—tetap relevan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan. Namun, perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sosial menuntut reinterpretasi konsep tersebut agar sesuai dengan era digital governance. Dengan demikian, penerapan good governance modern perlu memperhatikan aspek keamanan data, integrasi sistem, partisipasi digital masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Good Governance, Reformasi Birokrasi, Digital Governance, Administrasi Publik.

ABSTRACT

This article examines the concept of good governance as developed by Sedarmayanti in Reformasi Birokrasi dan Good Governance, and evaluates its relevance to the dynamics of modern governance marked by administrative digitalization, demands for efficiency, and increasing public oversight. The study was conducted through a literature review by analyzing public administration literature, bureaucratic reform regulations, and official government documents related to digital transformation. The findings indicate that the principles of good governance including transparency, accountability, effectiveness, rule of law, and public participation remain relevant as the foundation of governmental management. However, technological advancements and growing social complexity require a reinterpretation of these concepts to align with the era of digital governance. Therefore, the contemporary application of good governance must consider aspects such as data security, system integration, digital public participation, and cross-sector collaboration.

Keywords: Good Governance, Bureaucratic Reform, Digital Governance, Public Administration.

PENDAHULUAN

Perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia sejak era Reformasi telah menempatkan konsep good governance sebagai landasan normatif untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif. Reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 1998 mendorong bangsa ini untuk menata ulang struktur pemerintahan, memperbaiki sistem pelayanan publik, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu literatur yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah buku Sedarmayanti Reformasi Birokrasi dan Good Governance, yang memadukan teori administrasi publik dengan kebutuhan reformasi nasional.

Di tengah percepatan digitalisasi, good governance menghadapi tantangan baru. Sistem pemerintahan tidak lagi hanya beroperasi secara manual, tetapi bergantung pada integrasi teknologi informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), layanan publik digital, open data, dan mekanisme partisipasi masyarakat berbasis teknologi. Digitalisasi ini melahirkan peluang peningkatan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko seperti keamanan data, ketimpangan infrastruktur digital, dan kesenjangan literasi aparatur.

Selain dinamika digital, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Pemerintah dituntut untuk responsif, adaptif, dan mampu menyediakan layanan berkualitas. Dalam konteks tersebut, relevansi good governance perlu ditinjau kembali, baik dari sisi kekuatan konseptual maupun kecocokannya dengan lingkungan tata kelola kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti.
2. Mengkaji perkembangan paradigma governance dalam administrasi publik modern
3. Menganalisis relevansi konsep good governance terhadap birokrasi digital Indonesia.
4. Menawarkan reinterpretasi konsep good governance dalam era digital governance.

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik Indonesia dan memberikan rekomendasi teoretis bagi reformasi birokrasi ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance Menurut Sedarmayanti

Sedarmayanti (2009) memformulasikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Konsep ini memadukan nilai etika, teori organisasi publik, serta tuntutan modern dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Sedarmayanti, reformasi birokrasi mustahil dijalankan tanpa internalisasi nilai good governance pada seluruh level organisasi pemerintah.

Prinsip transparansi menjadi elemen utama yang memastikan keterbukaan pemerintah terhadap publik. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Transparansi ini menjadi fondasi bagi akuntabilitas, yang menuntut aparatur negara bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka lakukan.

Supremasi hukum merupakan prinsip berikutnya yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak masyarakat. Prinsip ini penting mengingat birokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan.

Efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya pencapaian tujuan organisasi dengan optimalisasi sumber daya. Dalam era modern, kedua prinsip tersebut semakin relevan karena pemerintah harus bersaing dengan sektor swasta dalam memberikan layanan cepat, mudah, dan murah. Partisipasi publik menjadi dimensi yang memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Sedarmayanti menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya melalui musyawarah formal, tetapi juga melalui mekanisme konsultasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

Teori Governance Modern

Di tingkat global, good governance diperkuat oleh kerangka yang dikembangkan UNDP (1997), World Bank, dan OECD. Mereka menekankan pentingnya integritas kelembagaan, kualitas regulasi, dan kolaborasi antaraktor dalam tata kelola publik. Model New Public Management (NPM) memperkenalkan unsur efisiensi ala sektor swasta,

sementara Collaborative Governance menempatkan kerja sama multisector sebagai strategi menghadapi masalah publik yang kompleks.

Sementara itu, Digital Governance atau Smart Governance berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Dalam model ini, pemerintah memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, dan integritas kelembagaan.

Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi Indonesia meliputi penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan integritas aparatur, serta penerapan SPBE sebagai strategi modernisasi administrasi. Transformasi ini sejalan dengan prinsip good governance, tetapi implementasinya belum sepenuhnya merata.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menelaah:

1. Buku Reformasi Birokrasi dan Good Governance karya Sedarmayanti.
2. Jurnal ilmiah administrasi publik.
3. Dokumen kebijakan pemerintah, termasuk Perpres 95/2018 tentang SPBE.
4. Laporan internasional (UNDP, OECD) terkait governance.
5. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi kesesuaian antara teori good governance dengan tuntutan pemerintahan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Era Digital

Dalam pemerintahan modern, transparansi diperkuat melalui portal data digital, publikasi anggaran, serta sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen pemerintah. Pemerintah Indonesia mengembangkan open data dan layanan digital seperti LAPOR! untuk meningkatkan transparansi.

Akuntabilitas meningkat melalui digital auditing, e-budgeting, dan e-procurement. Sistem digital memungkinkan penelusuran jejak administratif sehingga meningkatkan integritas aparatur.

Efektivitas dan Efisiensi dalam Layanan Publik Modern

Digitalisasi memungkinkan layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya:

1. Dukcapil Online mempercepat pembuatan dokumen kependudukan.
2. Sistem OSS mempermudah perizinan usaha.
3. Telemedicine semakin memperluas akses layanan kesehatan.

Digitalisasi menghemat biaya administrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Supremasi Hukum dan Tantangannya

Supremasi hukum tetap menjadi persoalan utama birokrasi Indonesia, terutama terkait:

1. Inkonsistensi penegakan hukum.
2. Tumpang tindih regulasi pusat dan daerah.
3. Lemahnya pengawasan internal.
4. Meski demikian, digitalisasi seperti case tracking system dapat memperkuat penegakan hukum.

Partisipasi Publik dan Demokrasi Digital

Media sosial memperluas ruang partisipasi publik. Masyarakat dapat mengawasi pemerintah secara langsung, menyampaikan pendapat, bahkan mempengaruhi kebijakan. Namun, tantangan umum mencakup:

1. Disinformasi
2. Polarisasi opini
3. Rendahnya literasi digital

Partisipasi publik perlu difasilitasi melalui kanal resmi seperti SP4N-LAPOR! agar lebih terarah.

Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia

Tantangan utama meliputi:

1. Ketimpangan teknologi antara daerah.
2. Rendahnya literasi digital aparatur.
3. Budaya birokrasi yang masih hierarkis.
4. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal.
5. Resistensi terhadap perubahan.

Reinterpretasi Good Governance untuk Pemerintahan Masa Depan

Konsep good governance perlu diperluas agar sesuai dengan era digital, meliputi:

1. Digital Accountability
2. Data Governance
3. Cybersecurity Governance
4. AI Governance
5. Platform-based Collaboration Governance

Prinsip governance masa depan harus mempertimbangkan isu keamanan data, kecerdasan buatan, pengawasan digital, serta transparansi algoritmik.

KESIMPULAN

Good governance menurut Sedarmayanti tetap relevan bagi reformasi birokrasi Indonesia. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik menjadi fondasi kuat tata kelola modern. Namun, dinamika digitalisasi memerlukan reinterpretasi konsep tersebut agar mampu menjawab tantangan baru. Pemerintah perlu memperkuat literasi digital aparatur, integrasi sistem, budaya organisasi yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, penerapan good governance modern harus bersifat hibrid: memadukan prinsip klasik dengan kebutuhan tata kelola digital masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2018). Research Design. SAGE Publi.
- Dwiyanto, A. (2011). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. (2018). Digital Government Review. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Addison-Wesley.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Clean Government. Bandung: Mandar Maju.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.